



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO 1 LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSW.5200.5201, (021) 3450959 FAKSIMILE 3846402, 3454640
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 1888 /PB/2018
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Usul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2018

22 Februari 2018

Yth. 1. Para Direktur
2. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan
3. Para Kepala Kantor Wilayah
4. Para Kepala Bagian lingkup Sekretariat DJPb
di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE-02/MK.1/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Usul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah bentuk penghargaan kepada PNS atas jasa-jasanya dan telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan, dengan maksud untuk mendorong serta meningkatkan pengabdian dan prestasi kerjanya, sehingga dapat dijadikan teladan bagi PNS lainnya.
2. Satyalancana Karya Satya sebagai penghargaan yang diberikan oleh Presiden RI kepada PNS dengan sangat selektif, merupakan catatan prestasi PNS yang diakui secara nasional, dan menjadi salah satu nilai yang dipertimbangkan dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
3. Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkup unit Saudara yang telah memiliki masa kerja 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun secara terus menerus sejak tanggal pengangkatan sebagai CPNS sampai dengan tanggal 1 Juli 2018, serta menurut penilaian Saudara telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagaimana diatur pada surat edaran tersebut di atas, dapat diusulkan untuk menerima anugerah Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2018.
4. Terkait hal tersebut di atas, usul penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2018 agar dikirimkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan u.p. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia melalui email silsdmperbendaharaan@gmail.com paling lambat tanggal 20 Maret 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berkas pendukung yang dikirimkan merupakan hasil **scan** dengan format sesuai dengan ketentuan pada Lampiran III berupa:
 - 1) Daftar Riwayat Hidup Lengkap sesuai Lampiran I;
 - 2) Surat Keputusan Pengangkatan Pertama sebagai CPNS;
 - 3) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - 4) Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir (bila menjabat); dan
 - 5) Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2017.
 - b. Daftar nama PNS calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya agar disampaikan sesuai Lampiran II surat ini dengan menggunakan format **MS Excel**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.



Direktur Jenderal Perbendaharaan
Sekretaris Direktorat Jenderal

NIP 19600603 198502 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;

LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 1888 /PB/2018

Tanggal : 22 Februari 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

1.	Nama Lengkap	Jelas
2.	Tempat Lahir / Tanggal Lahir	Jelas
3.	NIP	NIP 18 Digit
4.	Pendidikan Terakhir	Sesuai dengan SK Pangkat Terakhir
5.	Pangkat dan Golongan Ruang Terakhir	Jelas
6.	SK CPNS (No. dan Tanggal SK)	Jelas
7.	Jabatan Terakhir (No. dan Tanggal SK)	Jelas
8.	Jenis Kelamin	Pria/Wanita
9.	tanda kehormatan yang sudah dimiliki (Nomor, Tanggal dan Tahun Kepres)	Satyalancana Karya Satya
10.	Konversi NIP Baru dari BKN	NIP 18 Digit
11.	Hukumam disiplin (Nomor, Tanggal dan Tahun dijatuhi hukuman TMT s.d. selesai)	Hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
12.	CLTN (Nomor, Tanggal dan Tahun pelaksanaan s.d. selesai)	Jelas

(Tempat), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Mengetahui,
(Atasan Langsung).....
NIP

(Yang bersangkutan)

NIP

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan

Sekretaris Direktorat Jenderal

S. Hanjaya
NIP 19600603 198502 1 001

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 1808 /PB/21

Tanggal : 22 Februari 2018

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN YANG DIUSULKAN
MENERIMA TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
UNIT ESELON II:**

No	NIP	Gelar Depan	Nama Lengkap	Gelar Belakang	Pangkat	Gol.	Jabatan	TMT CPNS	Gelar Tanda Kehormatan	CLTN/ HUKDIS	Tanda Kehormatan yang dimiliki	Unit Eselon III	Unit Eselon II	Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Keterangan

1. Diisi dengan nomorurut berdasarkan Tanda Kehormatan dan Pangkat yang lebih tinggi.
2. Diisi dengan Nomor Induk Pegawai diawali tanda baca petik tunggal (').
3. Diisi dengan gelar akademik sesuai SK Kenaikan Pangkat Terakhir.
4. Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar.
5. Diisi dengan gelar akademik sesuai SK Kenaikan Pangkat Terakhir.
6. Diisi dengan Pangkat Terakhir sesuai SK Kenaikan Pangkat Terakhir.
7. Diisi dengan Golongan Ruang Terakhir sesuai SK Kenaikan Pangkat Terakhir.
8. Diisi dengan Jabatan PNS yang bersangkutan sesuai SK Jabatan Terakhir.
9. Diisi dengan TMT CPNS dengan format "dd/mm/yyyy".
10. Diisi dengan Usulan Gelar Tanda Kehormatan, contoh "SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN".
11. Diisi dengan Nomor Surat Keputusan SK CLTN/Hukuman Disiplin.
12. Diisi dengan Tanda Kehormatan yang dimiliki, contoh "SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN".
13. Diisi dengan unit Eselon III Pegawai yang diusulkan.
14. Diisi dengan unit Eselon II Pegawai yang diusulkan.
15. Diisi dengan Provinsi Kantor Pegawai yang diusulkan bekerja.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Sekretaris Direktorat Jenderal



NIP 19600603 198502 1 001

LAMPIRAN III

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 1888 /PB/2018

Tanggal : 22 Februari 2018

FORMAT BERKAS PENDUKUNG

1. File berkas pendukung dalam bentuk *portable document format* (PDF).
2. Ukuran file maksimal 500 Kb per jenis berkas.
3. Berkas pendukung diberi nama dengan format sebagai berikut:

NO	BERKAS PENDUKUNG	NAMA BERKAS PDF
1.	Daftar Riwayat Hidup Lengkap	DRH
2.	Surat Keputusan Pengangkatan Pertama sebagai CPNS	CPNS
3.	Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir	PANGKAT
4.	Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan terakhir (bila menjabat)	JABATAN
5.	Penilaian Prestasi Kerja PNS pada tahun sebelumnya	PPKP

4. Berkas pendukung dimasukkan dalam 1 (satu) folder per pegawai yang diusulkan.
5. Folder berkas pendukung diberi nama sebagaimana format berikut:
UNIT_NAMA LENGKAP
Contoh: DJPb_EKO PURBONO

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Sekretaris Direktorat Jenderal



Y Haryana

NIP 19600603 198502 1 001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR SE – 2 /MK.1/2018
TENTANG

USUL PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Umum

Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya merupakan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas jasa-jasanya dengan maksud mendorong serta meningkatkan pengabdian dan prestasi kerjanya, sehingga dapat dijadikan teladan bagi PNS lainnya.

Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diberikan kepada PNS yang aktif di lingkungan Kementerian Keuangan dan telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

Guna memberikan pedoman terkait dengan tata cara pengusulan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Surat Edaran atas nama Menteri Keuangan tentang Usul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di Lingkungan Kementerian Keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran (SE) ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengusulan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di lingkungan Kementerian Keuangan.

C. Ruang Lingkup

1. SE ini memuat tentang tata cara pengusulan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. SE ini ditujukan bagi seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan dan pengelola kepegawaian pada Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam mengajukan usul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.01/2016 tentang Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 356/KMK.01/2017.

E. Ketentuan

1. Kriteria Pegawai Yang Dapat Diusulkan
 - a. PNS yang memiliki masa kerja secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan Negara, selama menjalani masa kerja secara terus menerus tersebut.
 - b. Bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, perhitungan masa kerja dimulai sejak selesai menjalani hukuman disiplin.
 - c. Bagi PNS yang pernah mengambil cuti di luar tanggungan Negara, perhitungan masa kerja dimulai sejak tanggal aktif kembali bekerja sesuai surat keputusan pengaktifan kembali bekerja di instansi setelah cuti di luar tanggungan negara.
 - d. Memiliki Nilai Prestasi Kerja Pegawai minimal Baik selama 1 (satu) tahun terakhir.
2. Tata Cara Pengusulan
 - a. Masa kerja PNS yang diusulkan dalam Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya terhitung mulai tanggal pengangkatan Calon PNS sampai dengan tanggal 1 Juli pada setiap tahunnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Usul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2018 bagi PNS di lingkungan masing-masing diusulkan oleh Pejabat Eselon I secara kolektif kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Sumber Daya Manusia **paling lambat tanggal 1 April pada setiap tahunnya** dengan melampirkan *softcopy* hasil pindaian (*scan*) berkas pendukung sebagai berikut:
- 1) Daftar Riwayat Hidup Lengkap sesuai Lampiran I;
 - 2) Surat Keputusan Pengangkatan Pertama sebagai CPNS;
 - 3) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - 4) Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan terakhir (bila menjabat); dan
 - 5) Penilaian Prestasi Kerja PNS pada tahun sebelumnya.
- c. Selain mengusulkan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam pengusulan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2018 unit eselon I juga wajib:
- 1) mengirimkan *softcopy* daftar calon penerima dengan menggunakan format *Microsoft Excel* sebagaimana contoh dalam Lampiran II melalui *email* ke alamat **slks@kemenkeu.go.id**;
 - 2) mengirimkan *softcopy* berkas pendukung dengan menggunakan format sebagaimana contoh dalam Lampiran III melalui media penyimpanan seperti *flashdisk*;
- d. Usulan yang diterima melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 2 huruf b, tidak dapat diproses dan dapat diusulkan kembali pada tahun berikutnya.
- e. Usul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia melalui aplikasi Sistem Informasi Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (SIGTK).

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 5 Februari 2018

a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL



HADIYANTO
NIP 196210101987031006

Tembusan:
Menteri Keuangan Republik Indonesia



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I SURAT EDARAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR SE - 2 /MK.1/2018
TENTANG USUL PENGANUGERAHAN
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA
KARYA SATYA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

1.	Nama lengkap	Jelas
2.	Tempat Lahir / Tgl. Lahir	Jelas
3.	NIP	NIP 18 DIGIT
4.	Pendidikan Terakhir	Sesuai dengan SK Pangkat Terakhir
5.	Pangkat dan golongan ruang Terakhir	Jelas
6.	SK CPNS (No. dan Tanggal SK)	Jelas
7.	Jabatan Terakhir (No. dan Tanggal SK)	Jelas
8.	Jenis Kelamin	Pria / Wanita*)
9.	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (Nomor, tanggal dan Tahun Keppres)	Satyalancana Karya Satya
10.	Konversi NIP Baru dari BKN	NIP 18 DIGIT
11.	Hukuman disiplin (Nomor, tanggal dan Tahun dijatuhi hukuman TMT s.d selesai)	Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat
12.	CLTN (Nomor, tanggal dan Tahun pelaksanaan s.d selesai)	Jelas

(Tempat), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Mengetahui
(Atasan Langsung)

.....
NIP

(Yang bersangkutan)
NIP

a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL



Hadiyanto

HADIYANTO
NIP 196210101987031006



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II SURAT EDARAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR SE - 2 /MK.1/2018
TENTANG USUL PENGANUGERAHAN
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA
KARYA SATYA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG DIUSULKAN MENERIMA TANDA KEHORMATAN
SATYALANCANA KARYA SATYA
UNIT ESELON I :

No	NIP	Gelar Depan	Nama Lengkap	Gelar Belakang	Pangkat	Gol.	Jabatan	TMT CPNS	Gelar Tanda Kehormatan	CLTN/ HUKDIS	Tanda Kehormatan yang dimiliki	UNIT ESELON III	UNIT ESELON II	UNIT ESELON I	PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Keterangan:

- (1) Diisi dengan nomor urut berdasarkan Tanda Kehormatan dan Pangkat yang lebih tinggi.
- (2) Diisi dengan Nomor Induk Pegawai diawali tanda baca petik tunggal (').
- (3) Diisi dengan gelar akademik sesuai SK Kenaikan Pangkat Terakhir.
- (4) Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar.
- (5) Diisi dengan gelar akademik sesuai SK Kenaikan Pangkat Terakhir.
- (6) Diisi dengan Pangkat terakhir sesuai SK Kenaikan Pangkat Terakhir.
- (7) Diisi dengan Golongan Ruang sesuai SK Kenaikan Pangkat Terakhir.
- (8) Diisi dengan Jabatan PNS yang bersangkutan sesuai SK Jabatan terakhir.
- (9) Diisi dengan TMT CPNS dengan format "dd/mm/yyyy".
- (10) Diisi dengan Usulan Gelar Tanda Kehormatan, contoh "SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN".
- (11) Diisi dengan Nomor Surat Keputusan SK CLTN/Hukuman Disiplin.
- (12) Diisi dengan Tanda Kehormatan yang dimiliki, contoh "SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN".
- (13) Diisi dengan unit Eselon III Pegawai yang diusulkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (14) Diisi dengan unit Eselon II Pegawai yang diusulkan.
 - (15) Diisi dengan unit Eselon I Pegawai yang diusulkan.
 - (16) Diisi dengan Provinsi Kantor Pegawai yang diusulkan bekerja.
-

an MENTERI KEUANGA
SEKRETARIS JENDE

HADIYANTO
NIP 19621010198703



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III SURAT EDARAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR SE - 2 /MK.1/2018
TENTANG USUL PENGANUGERAHAN
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA
KARYA SATYA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

FORMAT BERKAS PENDUKUNG

1. File berkas pendukung dalam bentuk PDF.
2. Ukuran file maksimal 500 Kb per jenis berkas.
3. Berkas pendukung diberi nama dengan format sebagai berikut:

NO	BERKAS PENDUKUNG	NAMA BERKAS PDF
1.	Daftar Riwayat Hidup Lengkap	DRH
2.	Surat Keputusan Pengangkatan Pertama sebagai CPNS	CPNS
3.	Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir	PANGKAT
4.	Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan terakhir (bila menjabat)	JABATAN
5.	Penilaian Prestasi Kerja PNS pada tahun sebelumnya	PPKP

4. Berkas pendukung dimasukkan dalam 1 (satu) folder per pegawai yang diusulkan.
5. Folder berkas pendukung diberi nama sebagaimana format berikut:

UNIT_NAMA LENGKAP PEGAWAI

contoh SETJEN_EKO PURBONO

a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL


HADIYANTO
NIP 196210101987031006